

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimanakah pelaku perilaku kecurangan memaknai perilaku kecurangan Aparatur Sipil Negara, berikutnya adalah menemukan bagaimanakah pimpinan pelaku perilaku kecurangan memaknai perilaku kecurangan Aparatur Sipil Negara dan terakhirnya bagaimanakah upaya mengatasi perilaku kecurangan Aparatur Sipil Negara perspektif pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan temuan penelitian bahwa pelaku kecurangan memaknai perilaku kecurangan perilaku yang dilakukan secara sadar sebagai akibat dari tekanan humanis dan tekanan ekonomi. Saat yang bersamaan adanya peluang atau kesempatan, adanya kontrol yang lemah. Berikutnya sebagai emosi artinya perilaku kecurangan ini saat dilakukan tidak memikirkan dampak atau akibat saat keputusan tersebut dipilih yaitu perilaku kecurangan. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan temuan penelitian sebagai sesuatu yang salah dan sebagai seorang pimpinan harus memberikan contoh dan menaati peraturan yang berlaku. Tekanan yang diterima oleh pimpinan adalah mengikuti aturan yang ada, dengan melihat laporan monitoring ketidakhadiran dan juga laporan dari pelaku kecurangan yang tidak masuk. Peluang terjadi perilaku ini memang memungkinkan terjadi kapan saja dan pada bagian apa saja. Artinya karena pimpinan tidak memiliki kemampuan dan kepentingan apapun juga adanya kewajiban mengikuti aturan yang ada maka peluang terjadi pelanggaran berkembang. Pembeneran yang dilakukan oleh pimpinan pelaku perilaku kecurangan ini bukan tanpa alasan karena sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku bagi aparatur sipil negara. Selain itu, pembeneran yang dilakukan oleh pimpinan adalah dikarenakan agar para aparatur sipil negara yang lain tidak meniru perbuatan tersebut

Perilaku kecurangan aparatur sipil negara perspektif pengembangan sumber daya manusia di Pemerintah Kota Balikpapan memiliki tiga komponen utama, yakni dimensi ekonomi, psikologi dan sistem yang dilandasi oleh etika pengembangan sumber daya manusia sebagai pelengkap atas tiga komponen tersebut. Perilaku kecurangan sendiri sebagai *performance* atau tampilan individu aparatur sipil negara ini. Peneliti mengelaborasi dan menambahkan perspektif pengembangan sumber daya manusia dengan perilaku kecurangan sebagai upaya untuk pencegahan perilaku kecurangan ini terjadi. Peneliti menambahkan bahwa integritas sebagai tambahan kaki meja sebagai implementasi perilaku kecurangan. Integritas ini juga sebagai kualitas pada konsisten antara tindakan, nilai dan prinsip yang dipegang sebagai lingkungan pengendalian diantaranya adanya integritas dan nilai etika. Artinya, integritas yang tinggi maka tidak keinginan untuk melakukan perilaku kecurangan tidak terjadi hal ini dapat disebabkan oleh adanya rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Sebaliknya, jika integritasnya rendah maka ada kemungkinan akan terjadi perilaku kecurangan dan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kata kunci: perilaku kecurangan, pemerintah, pengembangan sumber daya manusia, makna

## ABSTRACT

This study aims to find out how the perpetrators of fraudulent behavior interpret the fraudulent behavior of the State Civil Apparatus, the next is to find out how the leaders of the perpetrators of fraudulent behavior interpret the fraudulent behavior of the State Civil Apparatus and finally how are the efforts to overcome the fraudulent behavior of the State Civil Servants from the perspective of human resource development. This study uses a phenomenological qualitative research method. The phenomenon found by researchers is based on research findings that the perpetrators of fraud interpret the behavior of consciously cheating as a result of humanist pressure and economic pressure. At the same time there is an opportunity or opportunity, there is a weak control. Next, as an emotion, it means that cheating behavior when it is carried out does not think about the impact or consequences when the decision is chosen, namely fraudulent behavior. This phenomenon is found by researchers based on research findings as something wrong and as a leader must provide an example and comply with applicable regulations. The pressure received by the leadership is to follow the existing rules, by looking at monitoring reports of absences as well as reports from perpetrators of fraud who do not enter. The opportunity for this behavior to occur is possible at any time and in any part. This means that because the leadership does not have the ability and interest whatsoever, there is an obligation to follow the existing rules, then the opportunity for violations to develop. The justification made by the leader of the perpetrators of this fraudulent behavior is not without reason because it is in accordance with the standard operating procedures applicable to the state civil apparatus. In addition, the leadership's justification is so that other state civil servants do not imitate this act.

The fraudulent behavior of state civil servants in the perspective of human resource development in the Balikpapan City Government has three main components, namely the economic, psychological and system dimensions based on the ethics of human resource development as a complement to these three components. The cheating behavior itself is the performance or appearance of the individual civil servants of this country. Researchers elaborate and add a human resource development perspective with fraudulent behavior as an effort to prevent this fraudulent behavior from occurring. The researcher adds that integrity is an additional table leg as an implementation of fraudulent behavior. This integrity is also a quality of consistency between actions, values and principles that are held as a control environment, including integrity and ethical values. That is, high integrity, so there is no desire to commit fraudulent behavior, it does not occur, this can be caused by a high sense of responsibility and commitment in doing work. Conversely, if the integrity is low, there is a possibility that fraudulent behavior will occur and it is not in accordance with the given responsibility.

Keywords: fraud behavior, government, human resource development, meaning